

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Palembang

Nadysa Aulia Fitriana^{a*}, Rita Martini^b, Yevi Dwitayanti^c

^{abc}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

*Corresponding Author: nadysaaaulia@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the impact of fixed asset administration, internal control systems, and human resource competencies on the quality of financial statements in Palembang city. The research data came from questionnaires distributed to 51 OPDs in Palembang City with a total sample of 102 respondents using probability sampling technique. The data were processed with narrative statistics and multiple linear regression analysis through SPSS software. The results showed that partially the administration of fixed assets had no effect on the quality of Palembang City's financial statements, the internal control system had an effect on the quality of Palembang City's financial statements, while human resource competence had no effect on the quality of Palembang City's financial statements. As for the simultaneous analysis, asset administration, internal control systems, and human resource competencies affect the quality of Palembang City Government financial statements with an adjusted R square value of 0.283.

Keywords: *Fixed Asset Administration; Human Resources; Internal Control; Quality of Financial Statements*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di kota Palembang. Data penelitian berasal dari kuisioner yang disebarkan ke 51 OPD di Kota Palembang dengan jumlah sampel sebanyak 102 responden menggunakan teknik *probability sampling*. Data diolah dengan statistik naratif dan analisis regresi linear berganda melalui bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penatausahaan aset tetap tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang. Adapun secara simultan, variabel penatausahaan aset, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai adjusted R square sebesar 0,283.

Kunci: Kualitas Laporan Keuangan; Penatausahaan Aset Tetap; Pengendalian Internal; Sumber Daya Manusia

@IJAAF 2022 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved

1. Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah rapor keuangan pemerintah daerah (pemda) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk itu, setiap pemda diharapkan dapat menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas menggunakan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas dari Financial Accounting Standards Board (FASB) merupakan laporan keuangan yang memenuhi unsur nilai relevan dan reliabel, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan ciri kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah diungkapkan secara wajar dan berkualitas, maka setiap tahunnya laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

BPK mengkaji opini wajib isu keuangan yang terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer Opinion*), dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Di lingkup daerah Provinsi Sumatera Selatan, LKPD Kota Palembang memperoleh opini WTP sebanyak 12 kali berturut turut dari tahun 2010 hingga 2021 (www.bpk.go.id). Penilaian opini diberikan sesuai kepatuhan Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, opini WTP ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan disebut berkualitas dan memenuhi kaidah pencatatan atau kecukupan pengungkapan. Walaupun demikian, opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Palembang memiliki catatan dalam hal penatausahaan aset tetap.

Pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2022 diperoleh temuan bahwa entitas yang diperiksa tidak secara benar mengungkapkan nilai aset yang didaftarkan pada laporan. Pada tahun 2020, rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh semua entitas di Sumatera Selatan mencapai 70,79 % dan menyisakan temuan berupa penatausahaan aset tetap yang belum tertib.

Pemeriksaan BPK pada tiga tahun terakhir sebagaimana dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) terdapat 34.631 temuan investigasi yang dilaporkan dalam 3.151 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan, Kinerja serta Kepatuhan yang berasal dari LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal.

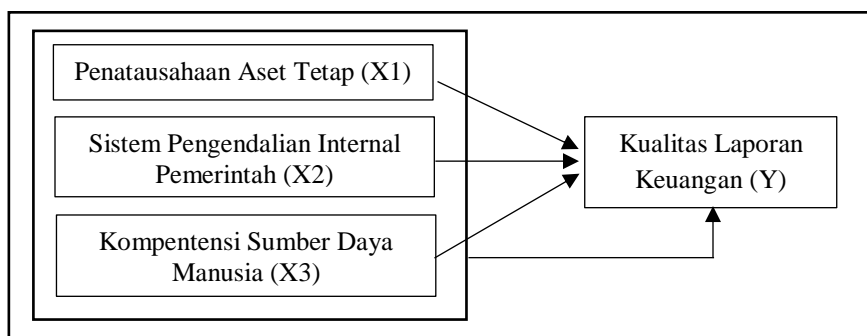
Peraturan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral berupa tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna menyampaikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kasmir (2012: 7) menjelaskan laporan keuangan ialah “laporan yang menunjukkan syarat keuangan perusahaan di waktu ini atau dalam suatu periode tertentu”. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 disebutkan, “laporan keuangan artinya laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Dengan demikian, laporan keuangan merupakan laporan yang menandakan kondisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, penatausahaan artinya “rangkaiannya aktivitas yang mencakup pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan barang milik wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Yunarni dan Wirastomo (2022) menyatakan bahwa pembukuan, inventaris, dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sementara itu, Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan oleh ketepatan waktu dan keandalan. Adapun terkait sumber daya manusia, Kiranayanti dan Erawati (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berupaya meneliti lebih lanjut hubungan variabel-variabel di atas, yaitu penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan lokasi penelitian di Kota Palembang (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Gambar 1, dalam penelitian ini diajukan 4 buah hipotesis, yaitu: (a) Hipotesis 1, variabel penatausahaan aset tetap secara parsial berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan; (b) Hipotesis 2, variabel pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan; (c) Hipotesis 3, variabel kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan; dan (d) Hipotesis 4, variabel penatausahaan aset tetap, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ialah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Peneliti mengumpulkan informasi lapangan yang terkait dengan penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian internal pemerintah, sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan dari pegawai yang bertanggung jawab terhadap proses anggaran yang terdapat pada Pemerintah Kota Palembang.

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen (X), yaitu penatausahaan aset tetap (X1), sistem pengendalian internal pemerintah (X2), dan kompetensi sumber daya manusia (X3), sedangkan variabel dependen (Y) adalah kualitas laporan keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik eksklusif yang ditetapkan oleh peneliti untuk digunakan sebagai acuan (Sugiyono, 2019: 126). Populasi meliputi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang berjumlah 51 OPD, terdiri atas 24 dinas dan 5 badan, 18 kecamatan, Satuan Pamong

Praja, RSUD Bari, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD Kota. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 39 OPD.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengirimkan kuesioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dengan dukungan perangkat lunak SPSS. Analisis ini dilakukan setelah melaksanakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik.

Uji validitas digunakan untuk mengukur legal/valid atau tidaknya suatu informasi. Suatu item dianggap valid jika mencapai koefisien hubungan minimal 0,30. Apabila nilai koefisien suatu item di bawah 0,30, maka dianggap tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang (Sugiyono, 2019: 181). Uji realibilitas mengukur konsistensi alat pengukur yang menunjukkan sejauhmana alat tersebut dapat dipercaya untuk mengukur suatu gejala (Subrata, 2004: 28).

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas tiga aspek, yaitu normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018: 161). Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (Ghozali, 2018: 107). Sedangkan uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tidak terjadi kesamaan variance dari residual satu ke yang lainnya (Ghozali, 2018: 137).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak antara variabel yang ada, baik positif maupun negatif, secara parsial ataupun simultan. Regresi linear berganda menggunakan persamaan berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji T dan uji F. Uji T bertujuan untuk mengetahui nilai signifikansi dari pengaruh setiap variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen), sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Instrumen Data

Uji validitas menguji valid tidaknya daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian dengan menggunakan kriteria nilai signifikansi hitung kurang dari 0,05 dan r-hitung lebih dari r-tabel, maka data dapat disimpulkan valid.

Uji realibilitas mengukur indikator penelitian berdasarkan kuesioner yang berisi kumpulan pertanyaan terkait dengan variabel yang diteliti dengan kriteria jawaban atas pertanyaan wajib konsisten dan stabil meskipun waktu terus berjalan dengan menggunakan pendekatan nilai koefisien harus lebih dari 0,60.

Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha pada variabel Penatausahaan Aset Tetap sebesar 0,871 dengan jumlah 14 item. Nilai ini lebih besar dari batas 0,60 sehingga variabel ini reliabel.

Tabel 1. Analisis Linier Berganda

Variable (constant)	B	Std. Error
	28.927	9.424
X1	-.140	.109
X2	.445	.081
X3	.097	.073

Tabel 2. Uji Hipotesis

R	R Square	Adjusted R Square
.552 ^a	.305	.283

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Sumber: Data diolah, 2022

Adjusted R square senilai 0,283 yang artinya 28,30% pengaruh kualitas laporan keuangan dijelaskan oleh variabel independen berupa penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia. Adapun sisanya senilai 71,70% dijelaskan oleh variabel yang lain di luar penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Pengujian Uji F

Variabel	F hitung	F tabel	Sig.
X1, X2, X3	14.310	2,69	.000 ^b

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai f-hitung senilai 14,310, nilai f-tabel senilai 2,69, nilai sig hitung senilai 0,000 dan nilai signifikansi alpha 0,05 yang artinya terdapat pengaruh simultan (bersamaan) di antara semua variabel.

Tabel 4. Hasil Pengujian Uji T

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.
X1	-1.276	1,65993	.205
X2	5.470	1,65993	.000
X3	1.325	1,65993	.188

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai t-hitung tiap variabel dan nilai signifikansi hitung tabel: Nilai t-hitung variabel penatausahaan aset tetap (X1) senilai -1,276, nilai t-tabel senilai 1,65993, nilai signifikan hitung senilai 0,205, dan nilai signifikansi alpha 0,05 yang artinya nilai t-hitung senilai -1,276 kurang dari nilai t-tabel senilai 1,65993. Ini menunjukkan bahwa variabel X1 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka Hipotesis 1 tidak diterima.

Pada sistem pengendalian internal pemerintah (X2), nilai t-hitung senilai 5,470, lebih dari nilai t-tabel senilai 1,65993 dan nilai signifikansi hitung senilai 0,000, kurang dari nilai signifikansi alpha 0,05. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, maka Hipotesis 2 diterima.

Pada variabel kompetensi sumber daya manusia (X3), nilai t-hitung senilai 1,325, kurang dari nilai t-tabel senilai 1,65993 dan nilai signifikansi hitung senilai 0,188 lebih dari nilai signifikansi alpha 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel X3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka Hipotesis 3 tidak diterima.

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel penatausahaan aset tetap sebesar -1,276 dengan nilai t-tabel sebesar 1,65993 yang menjelaskan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($-1,276 < 1,65993$) menggunakan nilai signifikan sebanyak 0,205, maka nilai signifikansi lebih besar dari 0,050 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y sehingga H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa penatausahaan aset permanen tidak mempunyai dampak secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penatausahaan aset tetap merupakan kegiatan rutin pemerintahan atas pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menjamin tertibnya pengelolaan barang milik negara. Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian Suwanda (2013) bahwa tidak ada dampak positif antara penatausahaan aset permanen terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Palembang belum maksimal melakukan penatausahaan aset tetap terhadap barang milik negara yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel sistem pengendalian internal sebesar 5,470, menggunakan nilai t-tabel sebesar 1,65993 yang menyebutkan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($5,470 > 1,65993$) dengan nilai signifikan sebesar 0,000, maka nilai signifikansi kurang dari 0,050. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki efek secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai standar kerja yang wajib dilaksanakan secara keseluruhan di lingkup pemerintah. Korelasi antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan berbanding lurus, yakni meningkatnya penatausahaan aset tetap berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa ada dampak positif antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi sistem pengendalian internal mempunyai kontribusi atas baiknya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang, jadi secara parsial variabel sistem pengendalian internal berpengaruh parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Sesuai hasil pengujian yang didapat menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel X3 merupakan 1,325 menggunakan nilai t-tabel sebanyak 1,65993 yang menjelaskan nilai t-hitung lebih besar berasal nilai t-tabel ($1,325 < 1,65993$) menggunakan nilai signifikan sebesar 0,188, maka nilai signifikansi lebih besar dari 0,050 sehingga dapat diuraikan bahwa variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki dampak secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, skill, dan perilaku yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan atau profesi. Korelasi antara X3 berbanding lurus menggunakan kualitas laporan keuangan ialah dengan meningkatnya sumber daya manusia akan beimplikasi pada meningkatnya kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa tidak terdapat dampak positif parsial antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Palembang belum maksimal dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, jadi secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Pengendalian, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Sesuai hasil pengujian secara simultan (Uji F) didapat nilai f-hitung variabel X1, X2, dan X3 senilai 14,310 lebih besar dari f-tabel senilai 2,69 dan memiliki signifikansi senilai 0,000 dengan nilai signifikansi senilai 0,005 yang menjelaskan terdapat pengaruh semua variabel dependen terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Dari hasil uji koefisien determinasi dengan nilai adjusted R square senilai 0,283 yang artinya 28,30% pengaruh kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen berupa penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan sisanya sebesar 71,70% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang, sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang, dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang. Adapun secara simultan, variabel penatausahaan aset, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai adjusted R square sebesar 0,283.

Daftar Pustaka

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25*. Cetakan IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kiranayanti, dan Erawati. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290-1318.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- _____. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- _____. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.
- Peraturan Walikota Palembang. (2018). Peraturan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2013). Peraturan Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
- Rahman & Permatasari. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.111533>.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- _____. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- _____. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sanjaya, Aditya. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *JOM Fekon*, 4(1).
- Wahida, N. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi Universitas Hasanudin, Makasar.
- Widari, Liziana, Sutrisno, & Sutrisno. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 5(10), 117-126.
- Widiati, Nugraha, Novianty. (2021). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualias Laporan Keuangan. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1, 1-8.
- Yunarni, T dan Wirastomo, H. (2022). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualias Laporan Keuangan. *Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6, 1-7. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.